



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Oktober 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : CALON PENYELENGGARA NEGARA
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MUHAMMAD ZUBIR
- Jabatan** : CALON PENYELENGGARA NEGARA
- NHK** : 977204

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.098.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
2. Tanah Seluas 148 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	311.500.000
1. MOBIL, HONDA HONDA HRV 1,5 SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT TIPE H1B02N42LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	48.489.646
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.520.989.646
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.520.989.646

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.